



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA MIGRASI ASN KE IBU KOTA NUSANTARA

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Analisis Legislatif Ahli Madya

dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia pengganti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Hal ini sejalan dengan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal percepatan pembangunan IKN melalui fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran negara. Selama dua tahun anggaran terakhir (2025–2026), Komisi II DPR RI telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur tahap pertama IKN. Komisi II DPR RI memastikan bahwa anggaran Otorita IKN difokuskan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur tahap pertama sekaligus memperkuat aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Salah satu agenda strategis yang diawasi adalah proses migrasi aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian/lembaga ke IKN mulai 2026, yaitu sekitar 2.400–2.600 ASN yang berpindah secara bertahap hingga 2028. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia dengan perpindahan awal 1.700–4.100 ASN.

Sementara itu, rencana migrasi ASN ke IKN, telah beberapa kali mengalami penundaan, mulai dari target Juli–November 2024, lalu mundur ke September 2024, kemudian ke Januari 2025, dan sempat disebut menjadi April 2025. Pada akhirnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) mengeluarkan surat penundaan pemindahan ASN hingga waktu yang belum ditentukan karena proses transisi pemerintahan masih berlangsung. Walaupun demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mematangkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN.

Sejak 2022, KemenPANRB telah menyiapkan rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga melalui proses penapisan yang komprehensif. Namun, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan sumber daya manusia (SDM), serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru. MenPANRB, Rini Widyantini, mengatakan pihaknya masih harus melakukan penapisan atau seleksi ulang dalam menjaring ASN yang akan pindah IKN. Proses ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih yang berpengaruh pada penyesuaian penempatan ASN.

KemenPANRB tetap berupaya memenuhi target Presiden Prabowo Subianto, yaitu memastikan ASN dapat mendukung fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Namun, hingga kini jumlah ASN yang akan dipindah dan waktu mulai pelaksanaannya belum dapat dipastikan, meskipun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memperkirakan sekitar 9.500 ASN akan bertugas di IKN pada 2029. Adapun perhitungan kebutuhan ASN harus menyesuaikan layanan yang akan disiapkan di IKN, sehingga Otorita IKN perlu mengikuti perencanaan yang disusun KemenPANRB. Estimasi 9.500 ASN dinilai sebagai proyeksi awal yang masih bergantung pada kesiapan infrastruktur. Keputusan soal waktu pemindahan ASN baru dapat ditetapkan setelah proses penapisan selesai, dan berharap ada arahan Presiden agar eksekusi pada 2028 dapat terlaksana.

Proses penapisan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, pemerintah menilai peran strategis setiap kementerian/lembaga, termasuk kontribusinya terhadap kepentingan negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. *Kedua*, pemerintah mengidentifikasi lembaga yang berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan nasional serta sistem pertahanan dan keamanan. *Ketiga*, pemerintah menganalisis risiko apabila fungsi lembaga tersebut tidak segera dipindahkan.

Pada Januari 2025, MenPANRB menerbitkan surat edaran yang menyesuaikan rencana pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, selaras dengan target penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional pada 2028. Penyesuaian ini memastikan bahwa pembangunan dan pemindahan ke IKN dilakukan untuk menjamin kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Migrasi ASN dipandang sebagai langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan di IKN. DPR RI menekankan perlunya kesiapan infrastruktur dasar dan penataan kelembagaan agar penempatan ASN berjalan sesuai rencana, sekaligus memastikan IKN berkembang sebagai pusat pemerintahan nasional yang modern dan inklusif. Pembangunan IKN dipandang sebagai proyek kebangsaan jangka panjang yang harus mengutamakan pembentukan budaya birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baru, bukan hanya pembangunan fisik semata.

Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, komitmen Komisi II DPR RI penting terhadap pembangunan IKN yaitu dengan pembahasan dan persetujuan APBN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur tahap pertama IKN. Untuk itu, Komisi II DPR RI perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sekaligus mendorong koordinasi rutin antarkementerian/lembaga dengan laporan perkembangan secara berkala. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu memastikan proses migrasi ASN ke IKN dapat berjalan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan agenda strategis setiap kementerian/lembaga. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu memastikan adanya dukungan adaptasi bagi ASN melalui penyediaan hunian yang layak, insentif penugasan, serta akses pendidikan dan kesehatan. Komisi II DPR RI juga harus mengawal transformasi budaya kerja melalui pelatihan birokrasi modern, sistem kerja digital, dan tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif. Pendekatan ini diharapkan agar pemindahan ASN tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga menghasilkan pemerintahan di IKN yang lebih efektif dan kesiapannya sebagai ibu kota politik Indonesia.

Sumber

detik.com, 19 November 2025;
finance.detik.com, 18 November 2025;
jdih.dpr.go.id, 11 November 2025; dan
nasional.kompas.com, 12 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*